

Implementasi Kebijakan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Garut

**Nurhasyifa Febrianti^{1*}, Titik Nurbiati¹, Tommy Wijaya¹,
Andre Ariesmansyah¹**

¹Administrasi Publik, Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

*Corresponding Author Email: nurhasyifa060204@gmail.com

Diterima: 9 Oktober, 2025, Direvisi: 8 November, 2025, Disetujui: 31
Desember, 2025

ABSTRACT

The availability of agricultural tools and machinery (alsintan) plays a crucial role in supporting agricultural productivity. Garut Regency, with its significant agricultural potential, requires effective policy support to ensure the adequate provision of these facilities. The Garut Regency Agriculture Office is responsible for managing alsintan distribution to farmer groups across the region. Cisurupan District, characterized by a high number of farmer groups and intensive farming activities, has a particularly high demand for these resources. This study examines the implementation of alsintan provision policies in Cisurupan District using a qualitative case study approach, including in-depth interviews, observation, and document analysis. George C. Edwards III's theory, which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, guides the analysis. The results show that the policy implementation is fairly well implemented, although there are still limitations in facilities that require improvement to provide more optimal services.

Keywords: Policy Implementation, Alsintan, Farmer Groups, Agriculture

ABSTRAK

Ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian sehingga memerlukan dukungan kebijakan penyediaan sarana pertanian yang memadai. Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut berperan sebagai tempat utama yang mengelola penyediaan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di berbagai wilayah Kabupaten Garut. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Kecamatan Cisurupan, karena memiliki jumlah kelompok tani yang banyak dan aktivitas pertanian yang intensif, sehingga kebutuhan terhadap alsintan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan alsintan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan fokus di Kecamatan Cisurupan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas yang perlu diperbaiki agar pelayanan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alsintan, Kelompok Tani, Pertanian

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki kontribusi penting dalam menunjang ketahanan pangan nasional, terutama di tengah berbagai dinamika global seperti perubahan iklim, inflasi harga bahan pangan, dan disrupsi rantai pasok. Di Indonesia, pembangunan pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga menjadi fondasi dalam pencapaian swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Badan Pangan Nasional menegaskan pentingnya semangat kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong tercapainya swasembada pangan nasional. Dalam mendukung tujuan tersebut, penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan), menjadi salah satu aspek strategis yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang secara konsisten menunjukkan ketergantungan ekonominya pada sektor pertanian. Kondisi ini memperkuat identitas Kabupaten Garut sebagai wilayah dengan basis perekonomian agraris (Garutkab.go.id, 2022). Wilayah Garut yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah memungkinkan pengembangan berbagai komoditas pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk alsintan, sebagai penunjang produktivitas dan efisiensi kerja petani.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pertanian Kabupaten Garut bertanggung jawab terhadap pengelolaan urusan pertanian. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 227 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Dinas Pertanian, dinas ini memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pertanian, termasuk penyediaan alsintan. Penyediaan alat dan mesin pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja petani di lapangan.

Dinas Pertanian Kabupaten Garut telah melakukan sejumlah langkah nyata dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Salah satu langkah strategis adalah pembangunan Gedung Brigade Alsintan pada tahun 2021, yang menjadi pusat pengelolaan penyediaan, penyimpanan, dan distribusi alsintan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Sebelumnya, pengelolaan alsintan dilakukan langsung di kantor dinas. Namun, karena meningkatnya permintaan dan kebutuhan sistematisasi pelayanan, dibentuklah unit khusus yang bersifat lebih

operasional dan efisien. Berdasarkan keterangan pihak dinas, Surat Keputusan (SK) pembentukan Gedung Brigade Alsintan baru diterbitkan pada tahun 2022, sehingga memperkuat landasan formal kelembagaannya.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Garut memiliki peran sentral dalam memastikan ketersediaan dan distribusi alsintan secara merata kepada kelompok tani. Untuk memperlancar pelayanan teknis di lapangan, terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah yang tersebar di 42 kecamatan. Setiap UPT bertanggung jawab mengelola layanan pertanian, termasuk penyediaan alsintan bagi kelompok tani di wilayah kerja masing-masing. Pembagian wilayah kerja ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan antara pemerintah daerah dan masyarakat tani, serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan program di lapangan.

Selain UPT Wilayah yang menjadi perpanjangan tangan Dinas Pertanian, di Kecamatan Cisarupan juga terdapat Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang berperan sebagai lembaga pengelola sekaligus penyedia jasa peminjaman alsintan di tingkat lokal. UPJA dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau kelompok tani yang memiliki kapasitas manajemen dan teknis memadai. Peran utama UPJA adalah mengoperasikan, merawat, dan mengatur jadwal penggunaan alsintan yang dipinjamkan oleh Dinas Pertanian.

Kecamatan Cisarupan yang termasuk dalam UPT Wilayah X memiliki 295 kelompok tani aktif, menjadikannya salah satu kecamatan dengan aktivitas pertanian tertinggi di Kabupaten Garut. Kondisi ini mencerminkan potensi pertanian yang besar sekaligus tantangan dalam pemerataan penyediaan alsintan. Tingginya jumlah kelompok tani menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengelola sumber daya pertanian, namun juga menimbulkan tingginya permintaan terhadap alat dan mesin pertanian. Permintaan yang meningkat ini sering kali menimbulkan antrean penggunaan alsintan, sehingga aktivitas pertanian seperti masa tanam dan panen tidak selalu dapat berjalan tepat waktu.

Alsintan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pemenuhan produksi dan produktivitas pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanian, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. (Hanggana, 2017).

Berdasarkan data inventaris Gedung Brigade Alsintan, jumlah alsintan yang tersedia di Kabupaten Garut mencapai 179 unit, termasuk traktor dua roda, handsprayer, dan pompa air. Namun, ketersediaan alat tersebut belum sebanding dengan kebutuhan petani di lapangan. Selain itu,

sebagian alat mengalami kerusakan dan belum mendapat perawatan optimal, sehingga mengurangi jumlah unit yang siap pakai. Kondisi ini menjadi hambatan dalam upaya optimalisasi produktivitas pertanian di Kecamatan Cisarupan dan wilayah lain di Kabupaten Garut.

Proses peminjaman alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut dilakukan melalui prosedur administratif yang diawali dengan pengajuan surat permohonan oleh kelompok tani kepada Kepala Dinas, disertai data kebutuhan dan waktu penggunaan. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi, peninjauan lapangan, serta musyawarah tim teknis untuk menentukan jenis alsintan yang akan dipinjamkan. Meskipun prosedur ini telah disusun secara sistematis, pelaksanaannya di lapangan kerap menemui kendala, terutama terkait keterbatasan jumlah alat.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan kebijakan penyediaan alat dan mesin pertanian menunjukkan kondisi yang bervariasi. Informasi mengenai prosedur peminjaman telah disampaikan kepada kelompok tani melalui jalur resmi dan berjenjang, sehingga memudahkan proses penyebaran informasi di tingkat pelaksana. Namun, ketersediaan alat masih terbatas dibandingkan jumlah kelompok tani yang ada, dan dukungan anggaran belum sepenuhnya memadai. Meskipun demikian, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya, meskipun implementasi di lapangan sering kali disesuaikan dengan kondisi aktual.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (Jumroh, 2021:122), yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini relevan dilakukan sebagai upaya mendukung implementasi kebijakan penyediaan alsintan dan mendorong optimalisasi pelayanan publik di sektor pertanian. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: "Implementasi Kebijakan dalam Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Garut (Studi Kasus Wilayah X Kecamatan Cisarupan)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Cisarupan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual dan memperoleh makna dari interaksi

antara pelaksana kebijakan, petani, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan alsintan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yang berfokus pada upaya memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan, hambatan, dan faktor-faktor pendukung dalam penyediaan alsintan di tingkat daerah. Pendekatan ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menjelaskan fenomena implementasi kebijakan secara komprehensif berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana, proses peminjaman, dan penggunaan alsintan. Sementara dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kegiatan, data inventaris, serta peraturan terkait kebijakan penyediaan alsintan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, n.d (2017), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menjadi landasan penelitian ini.

Pembahasan dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk naratif singkat, yang melibatkan Coding, Kategorisasi Data, dan Penentuan Thema untuk menjawab rumusan masalah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan baru. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

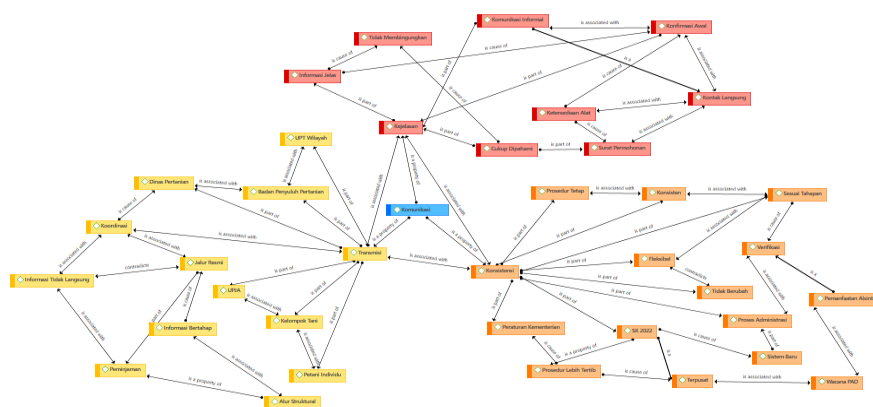
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan *Software* Atlas T.I melalui beberapa tahapan yaitu coding, menentukan kategori dan menentukan tema.

Peneliti mengelompokkan hasil riset ini menjadi 4 *thema*, 11 kategori

dan 114 *code* dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kategori yang diperoleh diantaranya meliputi Transmisi, Kejelasan, Konsistensi, Sumber Daya Aparatur, Anggaran, Fasilitas, Wewenang, Pengangkatan Birokrasi, Insentif, Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi. *Thema* yang ditemukan antara lain meliputi:

1. Komunikasi



Gambar 1. *Thema* Komunikasi

Thema pertama adalah Komunikasi. Komunikasi merupakan penghubung semua interaksi sosial. Apabila individu telah menjalin suatu hubungan secara tetap, maka siste komunikasi yang dihasilkan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat, mempersatukan, mengurangi ketegangan, melenyapkan persengketaan atau sebaliknya. Seperti dalam sebuah perusahaan yang memiliki struktur organisasi tertata, sangat bergantung pada keberhasilan komunikasi antara atasan dan bawahan yang ada di dalamnya. (Gustian Dkk, 2020; Sukoco Dkk, 2020).

Thema Komunikasi dalam penelitian ini terbagi melalui tiga aspek utama: Aspek Transmisi, Aspek Kejelasan, dan Aspek Konsistensi. Aspek pertama adalah transmisi, yakni bagaimana pesan kebijakan diturunkan dari level atas hingga ke pelaksana dan penerima manfaat di lapangan. Dari hasil wawancara dengan kepala bidang, staf administrasi, maupun kelompok tani, terungkap bahwa penyampaian informasi mengenai alsintan berlangsung secara berjenjang. Informasi awal disampaikan oleh Dinas Pertanian kepada UPT wilayah, kemudian diteruskan kepada BPP (Balai Penyuluh Pertanian), dan akhirnya sampai ke kelompok tani serta petani secara individu. Alur ini menunjukkan bahwa komunikasi berjalan dengan sistematis melalui struktur birokrasi yang telah ditetapkan. Informasi tidak disampaikan secara langsung dari dinas ke petani, melainkan melalui lembaga perantara yang memiliki fungsi koordinasi.

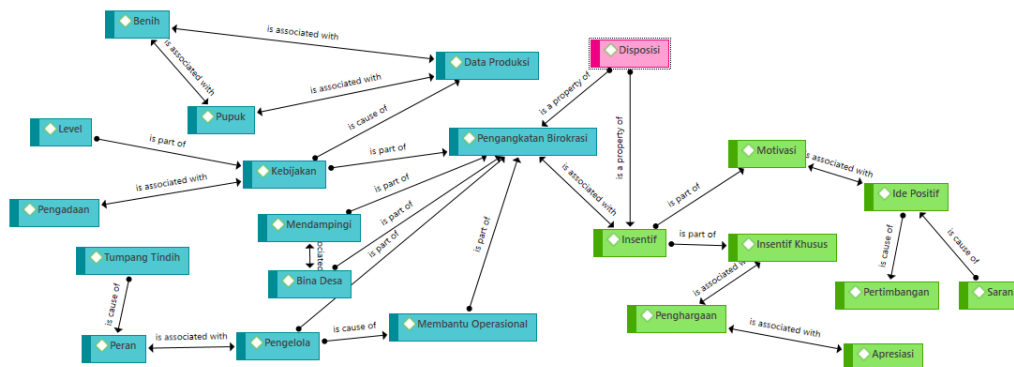
Aspek kedua adalah kejelasan. Berdasarkan hasil wawancara,

dalam wawancara juga menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap cepat dan kooperatif, namun mereka memahami bahwa jumlah petugas memang terbatas sehingga terkadang membutuhkan waktu lebih lama ketika banyak permintaan masuk bersamaan.

Kategori kedua adalah anggaran. Berdasarkan keterangan kepala bidang, anggaran penyediaan alsintan bersumber dari berbagai pos, seperti APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten. Namun, dana yang tersedia masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan, khususnya untuk memenuhi jumlah alsintan yang sebenarnya dibutuhkan petani. Informan menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya jumlah unit alsintan yang dapat disediakan maupun dirawat setiap tahunnya. Dari sisi administrasi, staf menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran juga memengaruhi kegiatan pencatatan maupun pemeliharaan alat. Meski begitu, kebijakan distribusi tetap berusaha dilakukan secara adil melalui mekanisme verifikasi surat dan penjadwalan peminjaman. Kelompok tani sendiri menilai bahwa ketersediaan alat cukup membantu, walaupun memang terkadang harus menunggu giliran karena jumlahnya terbatas.

Kategori ketiga adalah fasilitas penunjang alat dan mesin pertanian. Berdasarkan hasil analisis wawancara, observasi, dan literatur yang peneliti lakukan, fasilitas seperti alat dan mesin pertanian masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada khususnya di Kecamatan Cisurupan. Informan menyebutkan bahwa kelompok tani memang dapat mengakses alsintan ketika dibutuhkan, tetapi pada saat permintaan peminjaman sedang tinggi, sering kali terjadi antrean.

3. Disposisi



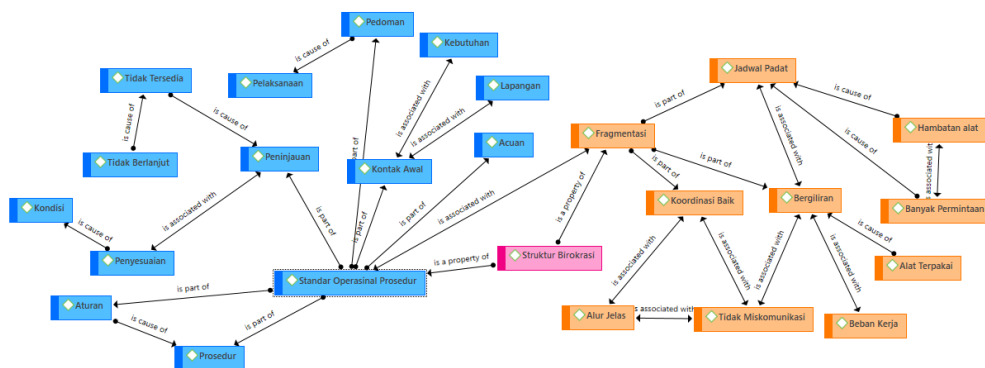
Gambar 3. *Thema Disposisi*

Thema ketiga adalah Disposisi. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator dari program. (Fathoni & Nurhayati, 2015)

Disposisi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua aspek utama: Aspek Pengangkatan Birokrasi dan Aspek Insentif. Aspek pengangkatan birokrasi ini dapat dilihat dari bagaimana pembagian tugas dan kewenangan antara Dinas Pertanian, UPT Wilayah, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), serta kelompok tani. Dinas pertanian berada pada level perencanaan, pengadaan, serta penetapan kebijakan umum. Selanjutnya, UPT Wilayah bertugas menjadi penghubung antara dinas dengan kelompok tani, dan bertugas untuk berkoordinasi dengan Balai Penyuluh Pertanian. Sementara itu, kelompok tani menjadi aktor utama penggunaan alat dan mesin pertanian. Kejelasan peran yang sudah dijelaskan menunjukkan bahwa birokrasi di tingkat pelaksana tidak mengalami kebingungan atau tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya struktur yang jelas membuat koordinasi lebih tertata.

Selain pengangkatan birokrasi, disposisi juga dipengaruhi oleh adanya insentif atau bentuk motivasi bagi penerima kebijakan.. Dari hasil wawancara dan observasi, isu insentif muncul sebagai salah satu poin penting. Dari hasil penelitian, hingga saat ini belum ada insentif khusus yang diberikan kepada kelompok tani sebagai pengguna. Namun, setelah dianalisis dari hasil wawancara dijelaskan bahwa gagasan pemberian insentif ini merupakan salah satu ide yang menarik dan berpotensi memperkuat implementasi kebijakan. Insentif dipandang dapat menjadi bentuk prioritas pelayanan bagi mereka yang tertib administrasi dan merawat alsintan pada saat peminjaman dengan baik.

4. Struktur Birokrasi



Gambar 4. *Thema Birokrasi*

Thema keempat adalah Struktur Birokrasi. Birokrasi sebagai tatanan sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki struktur, pembagian tugas, serta hierarki. (Astuti & Saputra, 2021). Dalam penelitian ini, Struktur Birokrasi terbagi menjadi 2 aspek utama yaitu Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan alsintan di

Kabupaten Garut berfungsi sebagai pedoman administratif sekaligus teknis dalam proses peminjaman alat. Pada aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai prosedur pengajuan alsintan oleh kelompok tani sudah cukup jelas, mulai dari kelompok tani membuat surat permohonan resmi, surat tersebut diverifikasi oleh UPT, kemudian diteruskan kepada Dinas Pertanian untuk disetujui melalui mekanisme musyawarah tim. Setelah disetujui, alsintan dapat dipinjam sesuai kebutuhan kelompok tani. Alur administrasi ini menunjukkan adanya sistem yang formal dan terdokumentasi dengan baik.

Selain SOP, struktur birokrasi dalam implementasi penyediaan alsintan juga terlihat dari pola koordinasi antarunit birokrasi atau fragmentasi. Dalam penelitian ini, Dinas Pertanian memiliki peran strategis sebagai penentu kebijakan, UPT bertindak sebagai pelaksana teknis, BPP (Balai Penyuluh Pertanian) mendampingi kelompok tani, sementara kelompok tani menjadi pihak pemohon sekaligus pengguna alsintan. Berdasarkan hasil analisis, koordinasi antarunit pada dasarnya berjalan cukup baik. Informasi dan instruksi disampaikan secara berjenjang dari Dinas ke UPT, kemudian ke BPP, hingga sampai ke kelompok tani. Fragmentasi peran ini justru memberikan kejelasan karena setiap level birokrasi memiliki tanggung jawab yang berbeda. Dinas berfokus pada persetujuan dan pengawasan, UPT pada verifikasi administrasi, BPP pada pendampingan, dan kelompok tani pada pemanfaatan alsintan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Cisurupan, menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan cukup baik namun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari empat tema utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi diketahui bahwa komunikasi antar lembaga sudah efektif dan prosedur peminjaman alsintan dipahami dengan baik, meski sering disertai komunikasi informal. Namun, keterbatasan, anggaran, dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan petani. Sikap pelaksana kebijakan sudah kooperatif, meskipun belum ada insentif yang dapat meningkatkan motivasi. Sementara itu, struktur birokrasi telah memiliki SOP yang jelas, tetapi masih memerlukan penyesuaian di lapangan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini sudah berjalan, namun perlu penguatan sumber daya dan dukungan insentif agar lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, H. D., & Saputra, E. (2021). BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Modrat*, 7(2), 177-184.
- Fathoni, M. D., & Nurhayati, Y. (2015). ASPEK PENTING DISPOSISI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN. *Prosiding Konferensi Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (KNPML)*, 1(1), 1-13.
- Gustian, V., Lubis, M., & Hasanuddin, H. (2020). Hubungan Moral Kerja dan Locus Kendali dengan Komitmen Organisasi Widyaaiswara. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 2(2), 153-167. doi:<https://doi.org/10.31289/tabularasa.v2i2.309>
- Hanggana, Sri, 2017, "Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, Upja, Dan Lkm-A. Dalam Peningkatan Pendapatan Petani". *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 15 No. 2, hh. 137-149 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v15n2.2>
- Jumroh, J., & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi pelayanan publik: Teori dan praktik. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia. In CV. Dharma Persada
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 227 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Dinas Pertanian
- Portal Pemerintah Kabupaten Garut. (2022, 05 Januari). Perekonomian Kabupaten Garut dari tahun ke tahun. Diakses tanggal 15 Juli 2025, dari <https://api.garutkab.go.id/page/pertanian>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendri, S., & Sari, N. (2023). ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19 DI DESA SUNGAI ARA. *Jurnal Landmark*, 4(2), 1-13.
- Sukoco, W., Lubis, M., & Hasanuddin, H. (2020). Hubungan Leader Member Exchange dan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi pada Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 2(2), 168-181